



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN FLORES TIMUR**



KATAPENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 telah diselesaikan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 ini merupakan dokumen yang memuat pedoman pelaksanaan kegiatan di Bidang Lingkungan Hidup untuk Tahun 2023.

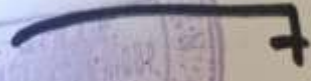
Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen perencanaan Prangkat Daerah yang memuat kebijakan dan Program/ kegiatan/ sub kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 dan untuk mereview hasil pelaksanaan rencana kerja tahun 2021 dan perkiraan realisasi capaian tahun berjalan (Tahun 2022). Rencana Kerja (Renja) termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Dengan adanya dokumen ini diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur dapat terukur dan berorientasi pada hasil yang berujung pada meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Flores Timur. Sekian dan terima kasih.

Larantuka, Agustus 2022



Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Flores Timur,



SERVULUS SATEL DEMOOR, S.Hut
Pembina Tk.I
NIP. 197112172000121002

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata pengantar	i
Daftar isi	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar	iv
Peraturan Bupati Flores Timur	
BAB I. PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-4
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian	
Renstra Perangkat Daerah	II-1
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-9
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	II-12
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II-13
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	II-23
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	III-1
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja perangkat Daerah	III-1
3.3 Program dan Kegiatan	III-2
BAB IV RENCANA KERJADAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	IV-1
BAB V PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022.....	I-2
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-10
Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023	II-14
Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2023.....	II-24
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2023.....	III-2
Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024	III-4
Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2023.....	IV-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	: Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah.....	I-2
------------	--	-----



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI FLORESTIMUR

NOMOR : 27 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN FLORESTIMUR TAHUN 2023



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Flores Timur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0033);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0161);
10. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13);

11. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 15);
12. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPPPPD adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur penunjang perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode tahun 2023-2026.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode tahun 2023-2026.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

11. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencanan belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tahun 2023 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Renstra PD, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun dengan berpedoman pada Renstra PD dan RKPD Tahun 2023.
- (3) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
 - c. BAB III : Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
 - d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
 - e. BAB V : Penutup
- (4) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Renja PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), menjadi pedoman bagi PD dalam menyusun RKA PD.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Kepala PD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD Tahun 2023 untuk menjaga konsistensi pelaksanaan RKPD Tahun 2023.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BPPPPD.
- (3) Kepala BPPPPD melakukan evaluasi RKPD Tahun 2023 dengan menggunakan hasil evaluasi Renja PD Tahun 2023.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 4 Juli 2022

PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

DORIS ALEXANDER RIHI

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 4 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PAULUS IGO GERODA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA TK.I
NIP. 19780426 200212 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan sektoral, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik Tahun 2023, Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Dengan demikian Renja PD Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 21 Tahun 2022.

Renja PD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang strategis dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, karena (1) *secara substansial*, memuat tujuan dan sasaran perangkat daerah, program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran serta pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; (2) *secara normatif*, menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah; (3) *secara operasional*, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan berdasarkan bidang urusan serta pembagian tugas dan fungsi, (4) *secara faktual*, menjadi tolak ukur untuk penilaian capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sektoral melalui realisasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Renja PD Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 merupakan penjabaran Tahun pertama Renstra PD Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023-2026, untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Renja PD Tahun 2023 memuat arah kebijakan pembangunan daerah yang dirumuskan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan perangkat daerah.

Renja PD Tahun 2023 disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Berdasarkan ketentuan tersebut tahapan penyusunan Renja PD adalah sebagai berikut :

1. Tahapan persiapan penyusunan; orientasi mengenai Renja PD serta penyiapan data dan informasi pembangunan Daerah.
2. Penyusunan rancangan awal; dilakukan berdasarkan Renstra PD dan hasil analisis gambaran pelayanan perangkat daerah dan hasil evaluasi Renja PD Tahun 2021.
3. Penyusunan Rancangan; dilakukan dengan menyempurnakan rancangan awal Renja PD

berdasarkan surat edaran Bupati Flores Timur Tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Renja PD

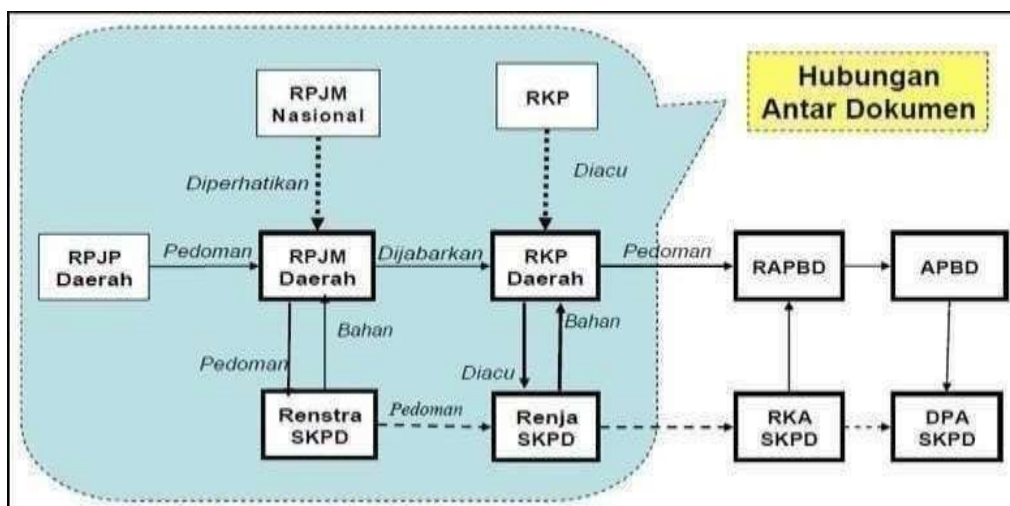
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah; dilakukan dengan pembahasan rancangan Renja PD bersama pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran sesuai tugas dan fungsi perangkat Daerah
5. Perumusan Rancangan Akhir; dilakukan dengan menyempurnakan rancangan Renja PD berdasarkan hasil musrenbang dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023;
6. Penetapan; dilaksanakan berdasar hasil verifikasi rancangan akhir Renja PD oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Flores Timur. Hasil penajaman program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif Renja PD berdasarkan rekomendasi Bappelitbangda, selanjutnya diusulkan untuk penetapan Renja PD dengan Peraturan Bupati.

Sebagaimana telah diuraikan diatas Renja PD Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023.

Selanjutnya Renja PD Tahun 2023 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat Daerah Tahun 2023. Hubungan Renja PD dengan Dokumen perencanaan lainnya dan Dokumen anggaran sebagaimana digambarkan pada Gambar 1.1 sebagai berikut:

gambar 1.1

Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah



1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 mengacu pada Peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Flores Timur Tahun 2005- 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur;
14. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 24 Tahun 2019 tentang kebijakan dan strategi kabupaten Flores Timur dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
15. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 73 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur;
16. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026;
17. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026;
18. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023;

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan RENJA Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 adalah tersedianya dokumen Rencana Kerja tahun 2023 yang merupakan penjabaran RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dan selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan RENJA Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 adalah sebagai acuan pelaksanaan Pembangunan Daerah Urusan Lingkungan Hidup

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen RENJADinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RENJA.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini berisi tentang evaluasi pelaksanaan renja Perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra

perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu- isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJADAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif Tahun 2023 serta Prakiraan Maju Tahun 2024.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah

Dalam rangka penyusunan dokumen Renja Tahun 2023 perlu dilakukan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan capaian Renstra Perangkat Daerah sampai Tahun Lalu sebagaimana digambarkan pada Tabel 2.1 Sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d Tahun 2022(Akhir Periode)	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2020	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2021			Target program/ kegiatan (Renja SKPD 2022)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2022	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
x xx 01	Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
x xx 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja OPD (dokumen)								
x xx 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja OPD (dokumen)	35	20	7	7	100	7	34	97
x xx 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN(kali)								
x xx 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN (bulan)	70	36	14	14	100	14	64	91
x xx 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan (Bulan)	60	36	12	12	100	12	60	100
x xx 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
x xx 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat lingkungan/ lab dan B3 (org)	25	7	-	-	-	-	7	28
x xx 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
x xx 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik yang disediakan (komponen)	65	36	12	12	100	6	54	83

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d Tahun 2022(Akhir Periode)	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2020	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2021			Target program/ kegiatan (Renja SKPD 2022)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2022	
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
x	xx	01	06	02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan (unit)	30	13	-	-	-	-	13	43
						Tersedianya peralatan gedung kantor (jenis)	32	8	-	-	-	-	8	25
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih (jenis)	75	36	12	12	100	20	68	91
						Jumlah alat tulis kantor, bahan dan kelengkapan komputer (jenis)	80	36	12	12	100	25	73	91
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan (lembar)	420.000	192.678	67.500	67.500	100	30.000	290.178	69
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar majalah yang disediakan (Jenis)	10	6	2	2	100	2	10	100
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan (OK)	5.140	2.462	1.124	1.124	100	250	3.836	75
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koor-dinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi (kali)	150	75	25	25	100	50	150	100
x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran (%)								
x	xx	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah meubelair berupa meja kerja 1/2 biro dan kursi kerja (uni)	50	8	-	-	-	-	8	16
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran (%)								
x	xx	1	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah pelayanan jasa surat menyurat (kali)	80	36	12	12	100	12	60	75

Kode					Urusan/Bidang Pemerintahan Urusan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d Tahun 2022(Akhir Periode)	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2020	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2021			Target program / kegiatan (Renja SKPD 2022)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2022	
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
x	xx	1	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pelayanan jasa-jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	60	36	12	12	100	12	60	100
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pendukung dan teknis perkantoran Non PNS (orang)	1.205	621	227	227	100	241	1.089	90
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah pelayanan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional(unit)	55	20	8	8	100	9	37	67
						Pemeliharaan kendaraan bermotor, penggantian suku cadang dan belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumnas (unit)	40	24	8	8	100	8	40	100
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terawatnya gedung kantor (gedung) dan perbaikan instalasi listrik (paket)	10	6	2	2	100	1	9	90
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara (unit)	30	13	5	5	100	10	28	93
x	xx	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		32	8	3	3	100	4	15	47
2	11				URUSAN PEMERINTAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d Tahun 2022(Akhir Periode)	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2020	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2021			Target program/ kegiatan (Renja SKPD 2022)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2022	
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	03	04			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Prosentase sampah perkotaan yang ditangani (%)	95,53							
1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	Prosentase sampah perkotaan yang ditangani (%)								
1	03	04	2.01	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang disediakan berupa TPS (unit)	63	59	-	-	-	-	59	94
1	03	04	2.01	06	Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah sarana kebersihan untuk pengelolaan persampahan (alat kebersihan/paket)	12	8	2	2	100	1	11	92
						Jumlah truck sampah dan gerobak sampah yang disediakan (unit)	50	5	-	-	-	1	6	12
2	11	02			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	<i>Presentasi Usaha Wajib AMDAL, UKL-UPL dan SPPL yang memiliki dokumen ijin Lingkungan</i>	26,2							
						<i>Jumlah dokumen informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup(Dokumen)</i>								
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota									
2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (Informasi Kinerja Pengelolaan LH) (dokumen)	5	3	1	1	100	1	5	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d Tahun 2022(Akhir Periode)	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2020	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2021			Target program/ kegiatan (Renja SKPD 2022)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2022	
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota									
2	11	02	2.02	03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Kajian Dampak Lingkungan (dokumen)	3	2	-	-	-	1	3	100
2	11	03			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Persentase usaha wajib AMDAL, UKL-UPL dan SPPL yang memiliki dokumen ijin lingkungan (%)	90,9							
						Persentase Daerah Mata Air yang dikonservasi (%)								
						Persentase Rehabilitasi lahan kritis (%)								
						Jumlah Laporan Status Baku Mutu Udara (Laporan)								
2	11	03	2.01		Pencegahan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota									
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Terpantaunya kualitas udara (laporan)	5	3	-	-	-	1	4	80
						Lokasi pemantauan kualitas lingkungan (kecamatan)	19	5	5	5	100	9	19	100
						Jumlah sumber air yang di pantau (titik)	50	23	10	10	100	10	43	86
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup	Pengadaan alat-alat dan bahan kimia laboratorium, uji profisiensi (alat/bahan kimia)	50	2	18	18	100	10	30	60

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d Tahun 2022(Akhir Periode)	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2020	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2021			Target program / kegiatan (Renja SKPD 2022)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2022	
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Prosentase daerah mata air yang dikonservasi (%)								
2	11	03	2.03	04	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah mata air yang dikonservasi (titik mata air)	32	7	-	-	-	5	12	38
						Luas daerah pantai yang direhabilitasi (lokasi)	5	3	-	-	-	1	4	80
						Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi/ penghijauan (ha)	171,739	57,80	-	-	-	2	59,80	35
2	11	04	2.01		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Sona Rehabilitasi Kawasan Konservasi Perairan Daerah dalam kondisi baik (%)	1.70							
						Persentase Pemenuhan Penyediaan RTH dikawasan Perkotaan (%)								
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penyediaan RTH dikawasan Perkotaan (%)								
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Terlaksananya penataan Ruang Terbuka Hijau (lokasi)	8	5	-	-	-	2	7,00	88
						Terlaksannanya pemeliharaan RTH (Lokasi)	16	4	2	2	100	2	8	50
						Terlaksananya pengembangan tanaman rekreasi	13	-	-	-	-	1	1	8
2	11	04	2.01	05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas kawasan terumbu karangyang di kelola	5	1	-	-	-	1	2	40

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d Tahun 2022(Akhir Periode)	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2020	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2021			Target program/ kegiatan (Renja SKPD 2022)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2022	
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	11	05			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Prosentase usaha wajib AMDAL,UKL-UPLdan SPPL yang memiliki dokumen ijin lingkungan (%)								
2	11	05	2.01		Penyimpanan Sementara Limbah B3									
2	11	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan	Jumlah instalasi pengelolaan B3 dan LimbahB3 (unit)	1	-	-	-	-	1	1	100
						Jumlah instalasi pengelolaan B3 dan Limbah B3 (paket)	2	-	-	-	-	1	1	50
						Jumlah Dokumen Monitoring dan evaluasi (dokumen)	5	2	1	1	100	2	5	100
2	11	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)									
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau KegiatanYang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Peme-rintah Daerah Kabupaten/Kota									
2	1	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	jumlah usaha yang memiliki dokumen ijin lingkungan (AMDAL,UKL-UPL dan SPPL) (kegiatan)	920	621	154	154	100	154	929	101

Kode					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d Tahun 2022(Akhir Periode)	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2020	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2021			Target program / kegiatan (Renja SKPD 2022)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2022	
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan /atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penertiban kegiatan Penambangan Tanpa Izin (PETI) (Kec.)	19	6	7	7	100	19	32	168
2	11	06	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah usahayang diawasi (usaha)	54	35	12	18	150	13	66	122
2	11	08			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jumlah dokumen informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup (dokumen)								

Kode					Urusan/Bidang Pemerintahan Urusan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d Tahun 2022(Akhir Periode)	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2020	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2021			Target program/ kegiatan (Renja SKPD 2022)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2022	
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
2	11	08	2.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah anggota masyarakat yang diedukasi (orang)	3.500	1.170	-	-	-	185	1.355	39
2	11	10			Program penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	<i>Persentase usaha wajib AMDAL,UKL-UPL dan SPPL yang memiliki dokumen ijin lingkungan</i>								
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(PPLH) Kabupaten/Kota									
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah kasus/ layanan pengaduan yang ditindaklanjuti(PPLH)	68	73	15	15	100	15	103	151
2	11	11			Program Pengelolaan Persampahan	Prosentase sampah perkotaan yang ditangani (%)	95,53							
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Prosentase sampah perkotaan yang ditangani (%)								

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d Tahun 2022(Akhir Periode)	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2020	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2021			Target program/ kegiatan (Renja SKPD 2022)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2022	
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah bulan pelayanan sampah perkotaan (bulan)	60	36	12	12	100	12	60	100
						Jumlah dokumen Laporan Periodik Bulanan Sampah Terhadap Volume Sampah harian	5	1	1	1	100	1	3	60
						Jumlah TPA yang dikelola (unit)	4	1	1	1	100	2	4	100
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dal Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya sosialisasi regulasi dan kebijakan lokal	5	1	-	-	-	5	6	120
						Jumlah keompok masyarakat dalam pengelolaan persampahan	6	2	2	2	100	2	6	100

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur didasarkan pada kajian capaian kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis sebagaimana pada tabel 2.2 Sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur

No	Indikator Kinerja	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	-	√	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Tahun 2022 telah tersusunnya dokumen RPPLH berupa Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (IKPLH)
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/Ptingkat daerah provinsi	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Tahun 2021 sampai dengan 2023 tidak dianggarkan untuk kegiatan ini
4	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	-	√	83,9	90,91	32,77		98,71	26			Pada Tahun 2022 usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengurusan izin lingkungan sebanyak 13 usaha dari target 50 baru mencapai 26%
5	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	-	√	4	5	-		-	-	-	-	Tahun 2021 sampai dengan 2023 tidak dianggarkan untuk kegiatan ini
6	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	-	√	7	7	-		-	-	-	-	Tahun 2021 sampai dengan 2023 tidak dianggarkan untuk kegiatan ini
7	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	-	√	7	7	-		-	-	-	-	Tahun 2021 sampai dengan 2023 tidak dianggarkan untuk kegiatan ini
8	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	-	√	7	7	-		-	-	-	-	Tahun 2021 sampai dengan 2023 tidak dianggarkan untuk kegiatan ini

No	Indikator Kinerja	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
9	Penetapan hak MHA	-	√	7	7	-		-	-	-	-	Penetapan hak MHA tidak dapat dihitung karena Tahun 2021 sampai dengan 2023 tidak dianggarkan untuk kegiatan ini
10	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	-	√	7	7	-		-	-	-	-	Tahun 2021 sampai dengan 2023 tidak dianggarkan untuk kegiatan ini
11	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	-	√	6	6	-		-	-	-	-	Tahun 2021 sampai dengan 2023 tidak dianggarkan untuk kegiatan ini
12	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	-	√	7	7	-		-	-	-	-	Tahun 2021 sampai dengan 2023 tidak dianggarkan untuk kegiatan ini
13	Timbulan sampah yang ditangani	-	√	87,57	95,53	-	-	-	50,35		-	Tahun 2021 sampai dengan 2023 tidak dianggarkan untuk kegiatan ini
14	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	-	√	30%	45%	0.27	0.27	-	-		-	Tahun 2021 sampai dengan 2023 tidak dianggarkan untuk kegiatan ini
15	Persentase cakupan area pelayanan	-	√	5,34		-	-	-	-		-	Tahun 2021 sampai dengan 2023 tidak dianggarkan untuk kegiatan ini
16	Persentase jumlah sampah yang tertangani	-	√	87,57	95,53	-	-	80,93	50,35		-	Tahun 2022 Persentase sampah yang tertangani mencapai 50,35 persen.
17	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	-	√	100%	100%	-	-	-	-		-	Tahun 2021 sampai dengan 2023 tidak dianggarkan untuk kegiatan ini
19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	-	√	-	-	69,71	69,71	-	-			Tahun 2021 sampai dengan 2023 tidak dianggarkan untuk kegiatan ini

Dari tabel 2.2. di atas, dapat dilihat bahwa target dan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan bidang urusan. Untuk indikator tersusunnya RPPLH Kabupaten/ Kota realisasi capaian setiap tahunnya 100% melalui disusunnya Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD). Untuk indikator Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota, capaian pada Tahun 2021 usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengurusan izin lingkungan sebanyak 156 usaha dari target 154 atau sebesar 98,71%. Sementara itu, untuk indikator Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R, pada Tahun 2021 sampai dengan 2023 tidak dianggarkan untuk kegiatan ini. Sedangkan pada indikator penetapan hak MHA yang mendukung pelayanan kinerja pada tingkat realisasi capaian tidak dapat dijalankan pada urusan lingkungan hidup.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Salah satu tugas pokok dinas lingkungan hidup yaitu menjalankan urusan bidang lingkungan hidup dalam hal pengelolaan persampahan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dalam penerapan pengelolaan sistem persampahan dilakukan dengan pengurangan sampah (melalui Pusat daur Ulang) dan penanganan sampah (pengangkutan sampah dari TPS ke TPA). Berkaitan dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat dilakukan melalui konservasi terhadap mata air dan rehabilitasi lahan kritis untuk mencapai kualitas lingkungan hidup. Namun dalam pelaksanaannya pengelolaan sampah dirasa masih belum cukup untuk mewujudkan tingkat realisasi urusan dinas lingkungan hidup sesuai yang diharapkan. Hal tersebut karena terdapat beberapa kendala yang dihadapi baik oleh petugas kebersihan terkait dengan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan juga pada pengurangan sampah melalui pusat daur ulang belum berfungsi secara baik. Pada pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup berbagai aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan sehingga menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan hidup yang dapat mempengaruhi terhadap kinerja pelayanan.

Adapun beberapa isu penting yang perlu menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah yang berkaitan dengan urusan persampahan dan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup :

1. Pengurangan persampahan melalui Pusat daur ulang (PDU) belum dapat beroperasi secara baik karena SDM yang belum siap sehingga menyebabkan pemilahan sampah belum optimal

2. Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
3. Kurangnya pengawasan yang dilakukan terhadap aktivitas penambangan liar, pembakaran hutan, *illegal logging* dan alih fungsi lahan disekitar sumber air yang dapat memberikan dampak pada kerusakan lingkungan hidup.

Selain hal diatas, belum maksimalnya kinerja pelayanan persampahan dan penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup disebabkan kondisi faktual seperti perilaku masyarakat yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan hidup. Upaya meningkatkan sistem pengelolaan persampahan dan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup perlu ditingkatkan melalui pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali (Pusat Daur Ulang) dan konservasi mata air dan rehabilitasi lahan kritis. Hal ini dapat memberikan positif terhadap peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup untuk mencapai tujuan dan sasaran daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif perangkat daerah maka analisis kebutuhan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel2.4
Review Terhadap Rancangan AwalRKPD Tahun 2023

DinasLingkungan Hidup Kabupaten FloresTimur					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISISKEBUTUHAN					CATATAN
PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATORKINERJA	TARGETCAPAIAN	PAGUINDIKATIF (Rp,-)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATORKINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp,-)						
DINAS LINGKUNGAN HIDUP				7.870.709.85					7.423.209.85						
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				5.583.000.000	Program Penunjang Urusan PemerintahanDaerahKabupaten/ Kota				5.585.500.000						
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Pesentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100		Program Penunjang Urusan PemerintahanDaerahKabupaten/ Kota		Pesentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100	5.585.500.000						
		Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur (%)	100				Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur (%)	100							
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100				Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100							
		Tingkat Pelayanan Administrsi Perkantoran(%)	100				Tingkat Pelayanan Administrsi Perkantoran(%)	100							
Perencanaan, Penganggaran, dan EvaluasiKinerjaPerangkat Daerah		Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dok)	8	45.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100	45.000.000						
Penyusunan Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)	2	15.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)	2	15.000.000						
Koordinasidan penyusunan dokumen RKA SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumen RKA-SKPD(dok)	2	10.000.000	Koordinasidan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD(dok)	2	10.000.000						
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD(laporan)	3	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD(laporan)	6	10.000.000						
EvaluasiKinerja Perangkat Daerah	Larantuka (OPD)	JumlahLaporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	10.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Larantuka (OPD)	Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah (Laporan)	4	10.000.000						
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya dokumen laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan (Dok)	3	1.662.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelaporan keuangan (%)	100	1.662.000.000						
Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN	Larantuka (OPD)	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN (Org/ bulan)	12	1.610.000.000	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Larantuka (OPD)	Jumlah orang yangmenerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	14	1.610.000.000						
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (dok)	1	47.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (dok)	12	47.000.000						

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISISKEBUTUHAN					CATATAN
PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATORKINERJA	TARGETCAPAIAN	PAGUINDIKATIF (Rp,	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATORKINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp,-)	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD(laporan)	2	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD(laporan)	2	5.000.000	
Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah		Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD (dok)	1	8.000.000	Administrasi Barang Milik DaerahpadaPerangkat Daerah		Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD (dok)	2	8.000.000	
Penyusunan perencanaan kebutuhan barangmilik daerah SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlahrencana kebutuhan barang milik daerah SKPD (dok)	1	4.000.000						Anggaran pada Sub Kegiatan dihilangkan sesuai RKPD Tahun 2023
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerahpada SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	4.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerahpada SKPD	2	8.000.000	Anggaran sesuai RKPD 2023
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	2	25.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	3	25.000.000	
Monitoring, evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (dok)	12	5.000.000	Monitoring, evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (dok)	1	5.000.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Larantuka (OPD)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan(orang)	2	15.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Larantuka (OPD)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan(orang)	2	15.000.000	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Larantuka (OPD)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	1	5.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Larantuka (OPD)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	1	5.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)		699.500.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100	699.500.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Larantuka (OPD)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	1	20.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Larantuka (OPD)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	20	20.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Larantuka (OPD)	Jumlah Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) ATK dan kelengkapan komputer	2	25.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Larantuka (OPD)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	25.000.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Larantuka (OPD)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tanggayang Disediakan (bahan kebersihan, perlengkapan rumah tangga/ dapur)	1	5.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Larantuka (OPD)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tanggayang Disediakan (paket)	1	5.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISISKEBUTUHAN					CATATAN
PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATORKINERJA	TARGETCAPAIAN	PAGUINDIKATIF (Rp,-	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATORKINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp,-)	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Larantuka (OPD)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantoryang Disiapkan (BBM)	1	435.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Larantuka (OPD)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	435.000.000	
Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan	Larantuka (OPD)	Jumlah Paket Barang Cetak danPenggandaan (Paket)	2	25.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Larantuka (OPD)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	25.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dok)	1	1.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yangDisediakan (dok)	1	1.500.000	
FasilitasiKunjungan Tamu	Larantuka (OPD)	Jumlah Laporan Fasilitasi KunjunganTamu (Rapat dan Tamu)	12	35.000.000	FasilitasiKunjungan Tamu	Larantuka (OPD)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	35.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	150.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	12	150.000.000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (sekat, folder, box arsip dan filing kabinet)	1	3.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen Penatausahaan ArsipDinamis pada SKPD (dokumen)	1	3.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintahDaerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahDaerah (unit)		103.000.000	Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)	18	100.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Larantuka (OPD)	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (AC, kulkas, genset, mesin potong rumput, sound system dll)	1	20.000.000	Pengadaan Peralatan danMesin Lainnya	Larantuka (OPD)	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnyayang disediakan (unit)	7	20.000.000	
Pengadaan aset takberwujud	Larantuka (OPD)	Jumlah unitaset tak berwujud lainnya yang disediakan	1	3.000.000						Anggaranpada Sub Kegiatanini dialihkan untuk sub kegiatan pemeliharaanaset tak berwujud
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atauBangunan Lainnya	Larantuka (OPD)	Jumlah unit sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (lapotop, printer)	5	30.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Larantuka (OPD)	Jumlah unit sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	10	30.000.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Larantuka (OPD)	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (pagar, taman, parkirand an gorden)	1	50.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung GedungKantor atau Bangunan Lainnya	Larantuka (OPD)	Jumlah unit sarana dan prasarana Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	1	50.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PemerintahanDaerah		Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)	100	2.661.683.015	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan sarana danprasarana kantor (%)	100	2.661.683.015	
Penyediaan Jasa Surat menyurat	Larantuka (OPD)	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (cetak kartu kendali, surat, lembar disposisi dan buku agenda surat)	12	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Larantuka (OPD)	Jumlah laporan penyediaan jasa suratmenyurat (laporan)	12	5.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALISISKEBUTUHAN					CATATAN
PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATORKINERJA	TARGETCAPAIAN	PAGUINDIKATIF (Rp,	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATORKINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp,-)	
Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	Larantuka (OPD)	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)	12	60.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Larantuka (OPD)	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)	12	60.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Larantuka (OPD)	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	12	2.596.683.015	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Larantuka (OPD)	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	12	2.596.683.015	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)		378.816.985	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahanDaerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	100	384.316.985	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasionalatau lapangan	Larantuka (OPD)	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (service, pajak perpanjangan STNK, sukucadang)	27	353.816.985	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasionalatau lapangan	Larantuka (OPD)	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (unit)	27	353.816.985	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya	Larantuka (OPD)	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)	1	10.000.000	PemeliharaanMebel		JumlahMebel yang Dipelihara(unit)		2.500.000	Disesuaikan dengan kebutuhan untuk engadaan Meubel
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Larantuka (OPD)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang terpelihara (unit)	5	10.000.000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Larantuka (OPD)	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (unit)	1	4.600.000	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana PendukungGedung Kantor atauBangunan Lainnya	Larantuka (OPD)	JumlahSarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara (unit)	5	5.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Larantuka (OPD)	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi(unit)	1	8.400.000	Disesuaikan dengan kebutuhan
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Larantuka (OPD)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang dipelihararehabilitasi(unit)	5	10.000.000	
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Larantuka (OPD)	JumlahSarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara (unit)	5	5.000.000	
UrusanPemerintahBidang Lingkungan Hidup				2.287.709.850	Urusan Pemerintahan Bidang LingkunganHidup				1.837.709.850	
ProgramPerencanaan Lingkungan Hidup		Persentase IKPLHD, KLHS, RPJMD (%)	100	200.000.000	Program Perencanaan Lingkungan Hidup		Persentase IKPLHD, KLHS, RPJMD (%)	100	30.000.000	
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				200.000.000	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (dokumen)	1	30.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALISISKEBUTUHAN					CATATAN
PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATORKINERJA	TARGETCAPAIAN	PAGUINDIKATIF (Rp,-)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATORKINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp,-)	
Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota		Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten atau kota yag disusun (Dokumen)	1	30.000.000	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Larantuka (OPD)	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten atau kota yagdisusun (Dokumen)	1	30.000.000	
Koordinasi penelaahan dokumen perencanaann pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya		Jumlah telaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Dok)	1	170.000.000						Sub kegiatan ini bukan termasuk urusan Pemerintahan bidang LingkunganHidup
ProgramPengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Persentase laporan kualitas lingkungan hidup (%)	75	987.709.850	Program Pengendalian Pencemaran dan/atauKerusakan Lingkungan Hidup		Persentase laporan kualitas lingkungan hidup (%)	75	737.709.850	
		Cakupan daerah yang dikonservasi (%)	25				Cakupan daerah yang dikonservasi (%)	25		
Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakanlingkunganhidup kab./kota		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan (Dokumen)	1	639.138.000	Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab./kota		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan (Dokumen)	3	462.709.850	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut		Jumah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air udara dan laut	1	30.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	19 Kec	Jumahdokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air udara dan laut(dokumen)	1	30.000.000	
Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasiperubahan iklim		Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan	1	15.000.000	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	19 Kec	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kacadari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan (dokumen)	1	15.000.000	
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yangdilaksanakan (dokumen)	1	594.138.000	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kec. Titehena, Kec. Tanjung bunga, Kec. Larantuka, Kec. Demong pangong, Kec.Lewolema	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang dilaksanakan (dokumen)	1	417.709.850	
			35							
			100							
Penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/ kota			3	40.000.000	Penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/ kota		Jumlah Penanganan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dihentikan(Titik)	3	25.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALISISKEBUTUHAN					CATATAN
PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATORKINERJA	TARGETCAPAIAN	PAGUINDIKATIF (Rp,	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATORKINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp,-)	
Penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		jumlah sumber pencemar dan atau kerusakan lingkungan hidup yang dihentikan(titik)	3	40.000.000	Penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Kec. Lantuka, Kec. Ile Bura, Kec. TanjungBunga	jumlah sumber pencemar dan atau kerusakan lingkungan hidup yang dihentikan(titik)	3	25.000.000	Disesuaikan dengan kebutuhan
Pemulihanpencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/ kota				308.571.850	Pemulihan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab./kota		Luas daerah ynnng dikonservasi/direhabilitasi (Ha)	15	250.000.000	
KoordinasiSinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi		Jumah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakatdi kabupaten/kota yang dilaksanakan	1	308.571.850	KoordinasiSinkronisasidan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kec. Titehena (Desa Adabang, Kec. Tanjung Bunga (Desa Bandona),Kec. Witihamas (Desa Lewopulo),Kec. Lantuka, Kec. Ile Bura, Kec. Wulanggitang (Ojan Detun), Kec. Solor Barat, Kec. Solor Selatan, Kec. Adonara Timur(Desa Puhu)	Jumah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakatdikabupaten/kota yang dilaksanakan(dokumen)	1	250.000.000	Disesuaikan dengan kebutuhan untuk konservasi mata air
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)		Persentase pengelolaan keanekaragaman Hayati (%)	9,41	250.000.000	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)		Persentase pengelolaan keanekaragaman Hayati (%)	9,41	220.000.000	
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)				250.000.000	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)		Jumlah Pengelolaan Luas Ruang Terbuka Hijau(Ha)	2,5	220.000.000	
Pengelolaan Taman keanekaragaman Hayati di luar kawasan Hutan		Luas Taman Kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/ Kota (Luas Total Ha) (Rencana luasan Kehati :40 Ha)	2	100.000.000	Pengelolaan Taman keanekaragaman Hayati di luar kawasan Hutan	Kec. Witihamas, Ile Boleng, Kec. Adonara	Luas Taman Kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/ Kota (Luas Total Ha)	2	70.000.000	Disesuaikan dengan kebutuhan
Pengelolaan RuangTerbukaHijau (RTH)		Luas RTH yang seharusnya dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/ Kota (Ha) (luas yang telah dikelola tahun 2021 : 3,624 Ha dan rencana pengembangan :2 Ha jadi sampai 4 tahun menjadi 5,624 Ha)	0,5	150.000.000	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kec. Lantuka, Kec. Adonara Timur, Kec. Witihamas, Kec. Adonara	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/ Kota (Ha)	0,5	150.000.000	
ProgramPengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3		Persentasi ketaatan fasilitas kesehatan, usaha/kegiatan terhadap pengelolaan limbah B3 (%)	37,31	30.000.000	Program Pengendalian Bahan Berbahayadan Beracun (B3) dan Limbah B3		Persentasi ketaatan fasilitas kesehatan, usaha/kegiatan terhadap pengelolaan limbah B3 (%)	37,31	30.000.000	
Penyimpanan sementara Limbah B3				30.000.000	Penyimpanan sementara Limbah B3		Jumlah Laporan Ketaatan, Usaha Kegiatan Terhadap Pengelolaan Limbah B3(laporan)	1	30.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALISISKEBUTUHAN					CATATAN
PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATORKINERJA	TARGETCAPAIAN	PAGUINDIKATIF (Rp,-	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATORKINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp,-)	
Verifikasi Lapangan untuk memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3		Jumlah Laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/ izin penyimpanan sementara dan pengukuran limbah B3 yang diverifikasi (laporan)	1	30.000.000	Verifikasi Lapangan untuk memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	19 Kec	Jumlah Laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/ izin penyimpanan sementara dan pengukuran limbah B3 yang diverifikasi (laporan)	1	30.000.000	
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Hidup dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		Persentase usaha yang wajib AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL yang memiliki dokumen persetujuan Lingkungan dan prosentase koordinasi dan sinkronisasi pengawasan sanksi upaya PPLH (%)	32,77	110.000.000	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Hidup dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup (PPLH)		Persentase usaha yang wajib AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL yang memiliki dokumen persetujuan Lingkungan dan prosentase koordinasi dan sinkronisasi pengawasan sanksi upaya PPLH (%)	32,77	110.000.000	
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau KegiatanYang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			100	110.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau KegiatanYang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen usaha yang wajib AMDAL, UKL-UPLdanSPPL(dokumen)	100	110.000.000	
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH		Jumlah rekomendasi dan/ atau persetujuan lingkungan, surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup dan surat kelayakan operasi (Jumlah usaha 200)	50	40.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	19 Kec	Jumlah rekomendasi dan/ atau persetujuan lingkungan, surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup dan surat kelayakan operasi (Dokumen)	50	40.000.000	
Pengawasan Usaha dan /atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang diawasi terhadap ketaatan terhdap persetujuan lingkungan, surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidu (SPPL), surat kelayakan operasional yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Usaha))(Jumlah usaha dari 2017 - 2021 = 200 usaha dan/ atau kegiatan	50	30.000.000	Pengawasan Usaha dan /atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	19 Kec	Jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang diawasi terhadap ketaatan terhdap persetujuan lingkungan, surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidu (SPPL), surat kelayakan operasional yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Usaha))	50	30.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH		Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLHD (200 usah yang diawasi)	1	40.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	19 Kec	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapansanksi upaya dan rencana PPLHD (dokumen)	1	40.000.000	
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat		Jumlah lembaga atau kelompok masyarakat atau institusi yang terdaftaryang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (lembaga)	1	75.000.000	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untukMasyarakat		Jumlah lembaga atau kelompok masyarakat atau institusi yang terdaftaryang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (lembaga)	1	75.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALISISKEBUTUHAN					CATATAN
PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATORKINERJA	TARGETCAPAIAN	PAGUINDIKATIF (Rp,-	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATORKINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp,-)	
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1	75.000.000	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga atau Instansi/Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Edukasi tentang Lingkungan Hidup(Lembaga)	1	75.000.000	
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah lembaga/ kelompok masyarakat/ Institusi	1	75.000.000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Adon, Timur	Jumlah lembaga/ kelompok masyarakat/ Institusi(lembaga)	1	75.000.000	
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		Persentase penanganan pengaduan masyarakat terhadap PPLH dan dokumen penyelesaian sengketa (%)	100	80.000.000	Program Penanganan Pengaduan LingkunganHidup		Persentase penanganan pengaduan masyarakat terhadap PPLH dan dokumen penyelesaian sengketa (%)	100	80.000.000	
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			2	80.000.000	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penerapan Sanksi Administrasi,Penyelesaian Sengketa Terhadap Lingkungan Hidup(Dokumen)	2	80.000.000	
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota		Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kab/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani (Dokumen)	1	40.000.000	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	19 Kec	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kab/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani (Dokumen)	2	40.000.000	
Koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi penyelesaian dokumen sengketa dan/ atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan		Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa terhadap dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan	1	40.000.000	Koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi penyelesaian dokumen sengketa dan/ ataupun penyidikan lingkungan hidupdi luar pengadilan atau melalui pengadilan	19 Kec	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa terhadap dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan(dokumen)	2	40.000.000	
ProgramPengelolaan Persampahan		Persentase penanganan sampah (%)	99	555.000.000	ProgramPengelolaan Persampahan		Persentase penanganan sampah (%)	99	555.000.000	
		Persentase Pengurangan sampah (%)	0,27				Persentase Pengurangan sampah (%)	0,27		
Pengelolaan sampah				555.000.000	Pengelolaan sampah		Jumlah penanganan sampah (Ton)	8.078,44	555.000.000	
Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali		Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan,pendauran ulang dan pemanfaatan kembali (laporan)	1 laporan	75.000.000	Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali	Kec. Larantuka	Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali (laporan)	1	75.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISISKEBUTUHAN					CATATAN
PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATORKINERJA	TARGETCAPAIAN	PAGUINDIKATIF (Rp,	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATORKINERJA	TARGETCAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp,-)	
Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah diTPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		Jumlh sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA kab/kota (ton/ kota)	8.078,037	195.000.000	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kec. Lantukadan Kec. Adonara Timur(Kel. WaiwerangKota)	Jumlhsampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA kab/kota (ton)	8.078,44	195.000.000	
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan		Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaansampah berbasis masyarakat (kelompok)	3	35.000.000	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Kel. SarotariTengah, Kel. Ekasapta (Kec. Lantuka),Oe Sayang(Kec. Adonara Tengah)	Jumlahmasyarakat, kelompokmasyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat (kelompok)	3	35.000.000	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kab/Kota		Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir (unit)	2	250.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kab/Kota	Kec. Adonara Timur, Kec. Lantuka	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir (unit)	2	250.000.000	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Desa Lamapaha, Kab. Flores Timur		300 anakan Beringin dan 300 anakan Pinang	Usulan tidak dapat diakomodir di dalam rencana kerja karena Lokasi untuk rehabilitasi berada dalam
		Desa Watobaya, Kab. Flores Timur		-	Usulan tidak dapat diakomodir di dalam rencana kerja karena Lokasi untuk rehabilitasi berada dalam kawasan hutan
		Desa Boru, Kab. Flores Timur		200 anakan	Sudah dilaksanakan pada tahun 2022
		Dusun 1 Apelame Dan 4 Werawutun, Kab. Flores Timur		1 paket	Usulan tidak dapat diakomodir di dalam rencana kerja karena Lokasi untuk rehabilitasi berada dalam kawasan hutan
		Desa Tanahwerang, Kab. Flores Timur		-	Sudah dilaksanakan Tahun 2022
		Desa Menanga, Kab. Flores Timur		-	Sudah dilaksanakan Tahun 2022
2	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)		Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati (%)	-	
	Kegiatan : Pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)		Jumlah pengelolaan luas ruang terbuka hijau (Ha)	-	
	Sub kegiatan : Pengelolaan Ruang terbuka Hijau (RTH)	Witihama, desa Pledo dusun Meko	Luas RTH yang seharusnya dikelola lingkup kewenangan kabupaten/ kota (Ha)	-	Diterima karena ada usulan tahun 2021, anggaran refofusing sehingga direncanakan tahun 2023
		Larantuka, Kabupaten Flores Timur		1 lokasi	Diterima karena Kondisi taman kota yang perlu mendapat pemeliharaan kebersihan dan ketertibannya

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/ kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan *bottom up planing* berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik bagi kelompok masyarakat maupun perangkat daerah kabupaten atau kota maupun penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan pada perangkat daerah.

Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggara tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/ kegiatan dalam Renja perangkat Daerah. Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah melakukan musrenbang kecamatan dari awal bulan Maret sampai awal bulan April Tahun 2022 dengan lingkup 19 Kecamatan dan telah dilakukan forum OPD dan dilanjutkan dengan forum konsultasi publik Tahun 2022.

Rekapitulasi musrenbang kecamatan Kabupaten Flores Timur 2022 dapat dilihat pada tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	ProgramPengendalian Pencemaran dan/ atau KerusakanLingkungan Hidup		Persentase laporan kualitas lingkungan hidup (%)	-	
			Cakupan daerah yang dikonservasi(%)		
	Kegiatan : Pemulihan Pencemaran dan/ atauKerusakan lingkungan hidup kab/ kota		Luas daerah yang dikonservasi/ direhabilitasi (Ha)	-	
	Sub kegiatan : Koordinasi sinkronisasi danpelaksanaan rehabilitasi	Desa Puhu (kec. Adonara Timur)	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi penghentian sumber pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat kabupaten kota yang dilaksanakan (Dokumen)	-	Usulan untuk sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi diakomodir dalam rencana kerja
		Kel. Puken Tobi Wangi Bao, Kec. Lrantuka, Lingkungan Lebao III, Kab. Flores Timur		1.000 anakan Bambu	Usulan untuk rehabilitasi lahan kritis pada masyarakat diakomodirdalam rencana kerja
		Wilayah Bronjong Kelurahan Balela,Kab. Flores Timur		10 Ha	Diterima. Akan dilakukan survey terhadap lokasi yang menjadi ancaman terjadinya banjir.
		Desa Lewotobi, Kab. Flores Timur		10.000 anakan Jati, 10.000 anakan Mahoni, 30.000 anakan Kemiri	Usulan untuk rehabilitasi lahan kritis pada masyarakat diakomodirdalam rencana kerja

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Desa Sulengwaseng, Kab. Flores Timur		3.000 anakan Sengon dan Trembesi	Usulan untuk rehabilitasi lahan kritis pada masyarakat diakomodirdalam rencana kerja
		Seluruh desa di kecamatan Ile Buradan desa Odjan Detun, kec. Wulanggitang		2000 anakan anakan jati putih dan mahoni	Usulan untuk rehabilitasi lahan kritis pada masyarakat diakomodirdalam rencana kerja
		2 Kecamatan di Kecamatan solor baratdan solor selatan		Penghijuan 3 mata air	Usulan untuk konsservasi mata air pada masyarakat diakomodir dalam rencana kerja
		Wilayah kecamatan solor barat		1 Paket penghijauan	Usulan untuk konsservasi mata air pada masyarakat diakomodir dalam rencana kerja
		Desa Bandon, Kec. Tanjung Bunga		-	Usulan untuk sosialisasi terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat diakomosir dalam rencana kerja
		Desa adabang, Kec. Tiehena		1 paket	Usulan untuk rehabilitasi lahan kritis pada masyarakat diakomodirdalam rencana kerja
		Desa Lewopulo, Kec. Witihama		1 paket	Usulan untuk konservasi mata air diakomodir dalam rencana kerja
		Desa Saosina, kampung baru		4 Ha	Usulan tidak dapat diakomodir di dalam rencana kerja karena rehabilitasi berada di dalam kawasan hutan bukan wewenang DLH
		Desa Oyangbarang, Kab. Flores Timur		-	Ditolak karena adanya bantuan dari APBD I

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Kecamatan Adonara		1 Lokasi	Usulan diterima untuk penambahan lokasi RTH
		Kelurahan Waiwerang, Kab. FloresTimur		1 Lokasi	diakomodir dalam rencana kerja Tahun 2023
3	Program pengelolaan persampahan		Persentase penanganan sampah (%)	1 Kelompok	
			Persentase pengurangan sampah (%)	-	
	Kegiatan : Pengelolaan sampah		Jumlah penanganan sampah (Ton)	-	
	Sub Kegiatan : Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Kelurahan Sarotari tengah , Kab. Flores Timur	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnyayang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat (Kelompok)	-	Usulan diterima untuk penambahan kelompok gempar
		Kelurahan Ekasapta, Kab. Flores Timur		-	Usulan diterima untuk lanjutan dari kegiatan Gempar
		Desa Oesayang, Kec-Adonara Tengah,Kab-Flores Timur		-	Usulan diterima untuk penambahan kelompok gempar
4	Program Pengelolaan sampah		Persentase penanganan sampah (%)		
			Persentase pengurangan sampah (%)		
	Kegiatan :Pengelolaan sampah		Jumlah penanganan sampah (Ton)		
	Sub kegiatan : Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/ Kota	Kelurahan Waiwerang, Kab. FloresTimur	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatanpemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan	1 Unit Dump Truck	Diterima karena di Waiwerangbelum ada mobil sampah

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		RT.003, RT.008 dan RT.013 kelurahan waihali, Kab. Flores Timur	Jumlah penanganan sampah (Ton)	5 unit TPS	
		RT 002 RW 001 dan RT 019 RW 006, Kab. Flores Timur	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatanpemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir (Unit)	3 Unit TPS	
		Dusun I, II, III dan tempat umum desa, Kab. Flores Timur		10 Unit TPS	
		tersebar di Kelurahan Lewolere, Kab. Flores Timur		4 unit Motor gerobak	
		RT 001 dan RT 007 kelurahan larantuka, Kab. Flores Timur		1 Unit TPS	
		RT.001 -010 Kelurahan Sarotari Timur, Kab. Flores Timur		2 unit motor gerobak	
		Kelurahan Amagarapati, Kab. Flores Timur		1 unit TPS	
		Kelurahan Sarotari Tengah, Kab. Flores Timur		2 unit motor gerobak	
		Lingkungan Kampung Tengah, Lingkungan Lebao I, Lingkungan Lebao II, dan Lingkungan Lebao III, Kab. Flores Timur		4 unit TPS	
		Watowiti, Kab. Flores Timur		1 unit TPS	
		Kelurahan Sarotari Timur, Larantuka, Postoh dan Pohon Sirih Kab. Flores Timur		4 Unit TPS	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Dalam rangka menjamin sinergitas pembangunan Daerah dan Nasional, serta untuk mendukung pencapaian visi dan misi RPJMN, Pemerintah telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi pelaksanaan pembangunan yang mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi.

Untuk mendukung 5 (lima) arahan pemerintah tersebut dan memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan Nasional Tahun 2023, Pemerintah menetapkan tema RKP Tahun 2023 yaitu ***“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”***. Tema pembangunan tersebut dilaksanakan dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN), salah satu prioritas nasional yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yakni PN 6: *Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim*.

Kebijakan Nasional tersebut sejalan dengan upaya pemerintah Kab. Flores Timur (Diinas Lingkungan Hidup) untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan suatu kondisi yang dicapai. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran perangkat daerah ditetapkan dengan mengacu kepada tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Hal ini menggambarkan sinergitas dan sinkronisasi pembangunan daerah berdasarkan Renstra Perangkat daerah tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup dikaitkan dengan sasaran kinerja Renstra perangkat daerah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun Dasar	Target Kinerja Sasaran
			2021	2023
Terwujudnya kualitas Lingkungan hidup yang baik	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	0	69,71

angka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan pada Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah menetapkan Tema RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 yakni: “**Peningkatan produktivitas untuk Transformasi ekonomi dan daya saing daerah**” dengan fokus pada 4 (empat) Prioritas pembangunan.

Sasaran dan target kinerja prioritas pembangunan tersebut dapat dilihat pada gambaran Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 sebagai berikut;

PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA
1	2	3	4
3	3.6 Infrastruktur, lingkungan hidup dan mitigasi bencana	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (point)
	3.7 Meningkatkan sistem pengelolaan lahan yang ramah lingkungan	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R (%)	69,71 0,27

3.3 Program dan Kegiatan

Perencanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Program dan Kegiatan yang akan direncanakan pada Tahun 2023 untuk mendukung pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur.

Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2023 mempunyai 2 (dua) program prioritas dalam rangka pemenuhan tujuan dan sasaran. Program prioritas tersebut terdiri dari:

1. ProgramPengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Kegiatan :

- 1) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- 2) Penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota
- 3) Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

2. ProgramPengelolaanPersampahan

Kegiatan:

- 1) Pengelolaansampah

Rumusan rencana program prioritas Dinas Lingkungan Hidup KabupatenFlores Timur Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp,)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp,)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	11				DINAS LINGKUNGAN HIDUP								
2	11				Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup (Program Prioritas)				1.292.709.850				680.500.000
2	11	03			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase laporan kualitas lingkungan hidup (%)		75	737.709.850			75	450.500.000
						Cakupan daerah yang dikonservasi (%)		25				50	
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab./kota	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan (Dokumen)		3	462.709.850				230.500.000
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air udara dan laut(dokumen)	19 Kec	1	30.000.000	APBD II		1	20.000.000
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan (dokumen)	19 Kec	1	15.000.000	APBD II		1	12.500.000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp,)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp,)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang dilaksanakan (dokumen)</i>	Kec. Titehena, Kec. Tanjungbunga, Kec. Larantuka, Kec. Demongpangong, Kec.Lewolema	1	417.709.850	APBD II		1	198.000.000
2	11	03	2.02		Penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/ kota	<i>Jumlah Penanganan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dihentikan(Titik)</i>		3	25.000.000			3	20.000.000
2	11	03	2.02	03	Penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	<i>jumlah sumber pencemar dan atau kerusakan lingkungan hidup yang dihentikan(titik)</i>	Kec. Larantuka, Kec. Ile Bura, Kec. Tanjung Bunga	3	25.000.000	APBD II		3	20.000.000
2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab./kota	<i>Luas daerah ynng dikonservasi/direhabilitasi (Ha)</i>		15	250.000.000			15	200.000.000
2	11	03	2.03	04	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	<i>Jumah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakatdi kabupaten/kota yang dilaksanakan(dokumen)</i>	Kec. Titehena (Desa Adabang,Kec. Tanjung Bunga (Desa Bandona),Kec. Witihama (Desa Lewopulo),Kec. Larantuka, Kec. Ile Bura, Kec. Wulanggitang (Ojan Detun), Kec. Solor Barat, Kec. Solor Selatan, Kec. Adonara Timur(Desa Puhu)	1	250.000.000	APBD II		1	200.000.000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp,)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp,)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	11	11			Program Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah (%)		99	555.000.000			99	230.000.000
2	11					Persentase Pengurangan sampah (%)		0,27				0,28	
		11	2.01		Pengelolaan sampah	Jumlah penanganan sampah (Ton)		8.078,44	555.000.000			15.772,19	230.000.000
2	11	11	2.01	02	Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali	Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali (laporan)	Kec. Larantuka	1	75.000.000	APBD II		1	50.000.000
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlh sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA kab/kota (ton)	Kec. Larantuka dan Kec. Adonara Timur(Kel. Waiwerang Kota)	8.078,44	195.000.000	APBD II		15.772,19	150.000.000
2	11	11	2.01	04	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat (kelompok)	Kel. Sarotari Tengah, Kel. Ekasapta (Kec. Larantuka), Oe Sayang (Kec. Adonara Tengah)	3	35.000.000	APBD II		3	30.000.000
2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPAKab/Kota	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir (unit)	Kec. Adonara Timur, Kec. Larantuka	2	250.000.000	APBD II		-	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023.

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur Tahun 2023

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2					Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
2	11				DINAS LINGKUNGAN HIDUP			7.423.209.850						6.563.650.290
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			5.585.500.000						5.489.800.000
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Pesentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100	5.585.500.000				PP	100	5.489.800.000
						Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur (%)	100						100	
						Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100						100	
						Tingkat Pelayanan Administrsi Perkantoran(%)	100						100	
x	xx	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100	45.000.000				KP	100	45.000.000
x	xx	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)	2	15.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			2	15.000.000
x	xx	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD(dok)	2	10.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			2	10.000.000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x	xx	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD(laporan)</i>	6	10.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			6	10.000.000
x	xx	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)</i>	4	10.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			4	10.000.000
x	xx	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase pelaporan keuangan (%)</i>	100	1.662.000.000				KP	100	1.895.340.000
x	xx	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)</i>	27/14	1.610.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			27/14	1.843.340.000
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (dok)</i>	12	47.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			12	47.000.000
x	xx	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	<i>Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD(laporan)</i>	2	5.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			2	5.000.000
x	xx	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)</i>	2	8.000.000					2	8.630.000
x	xx	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	<i>Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)</i>	2	8.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			2	8.630.000
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)</i>	3	25.000.000					1	25.000.000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x	xx	01	2.05	05	Monitoring, evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (dok)</i>	1	5.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			1	15.000.000
x	xx	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan(orang)</i>	2	15.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			1	10.000.000
x	xx	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)</i>	1	5.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)				
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)</i>	100	699.500.000				KP	100	689.500.000
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)</i>	20	20.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			20	20.000.000
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)</i>	2	25.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			2	25.000.000
x	xx	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)</i>	1	5.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			1	5.000.000
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)</i>	1	435.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			1	435.000.000
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)</i>	2	25.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			2	30.000.000
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dok)</i>	1	1.500.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			1	1.500.000
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)</i>	12	35.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			12	35.000.000
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)</i>	12	150.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			12	135.000.000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x	xx	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dokumen)</i>	1	3.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			1	3.000.000
x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)</i>	18	100.000.000				KP		-
x	xx	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)</i>	7	20.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)				
x	xx	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah unit sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)</i>	10	30.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)				-
x	xx	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah unit sarana dan prasarana Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)</i>	1	50.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			-	-
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)</i>	100	2.661.683.015					100	2.633.000.000
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	<i>Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)</i>	12	5.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			12	5.000.000
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)</i>	12	60.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			12	60.000.000
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)</i>	12	2.596.683.015	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			12	2.568.000.000
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)</i>	100	384.316.985				KP	100	193.330.000
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	<i>Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (unit)</i>	27	353.816.985	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			27	165.330.000
x	xx	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara(unit)</i>	15	2.500.000					0	-
x	xx	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	<i>Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (unit)</i>	1	4.600.000	Larantuka (OPD)	APBD II			1	4.600.000
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)</i>	1	8.400.000	Larantuka (OPD)	APBD II			1	8.400.000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang dipeliharaan/direhabilitasi(unit)	5	10.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II			1	10.000.000
x	xx	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	5	5.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II			5	5.000.000
2	11				Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup			1.837.709.850						1.073.850.290
2	11	02			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase IKPLHD, KLHS, RPJMD (%)	100	30.000.000				PP	100	25.000.000
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (dokumen)	1	30.000.000				KP	1	25.000.000
2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten atau kota yag disusun (Dokumen)	1	30.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II(DAU)			1	25.000.000
2	11	03			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase laporan kualitas lingkungan hidup (%)	75	687.709.850			PN-6	PU-3	75	450.500.000
						Cakupan daerah yang dikonservasi (%)	25						50	
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab./kota	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan (Dokumen)	3	462.709.850			KP-6	KU-3	3	230.500.000
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air udara dan laut(dokumen)	1	30.000.000	19 Kec	APBD II(DAU)			1	20.000.000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	<i>Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan (dokumen)</i>	1	15.000.000	19 Kec	APBD II(DAU)			1	12.500.000
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang dilaksanakan (dokumen)</i>	1	417.709.850	Kec. Titehena, Kec.Tanjungbunga, Kec. Larantuka, Kec. Demongpangong, Kec.Lewolema	APBD II(DAU)			1	198.000.000
2	11	03	2.02		Penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/ kota	<i>Jumlah Penanganan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dihentikan(Titik)</i>	3	25.000.000			KP-6	KU-3	3	20.000.000
2	11	03	2.02	03	Penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	<i>jumlah sumber pencemar dan atau kerusakan lingkungan hidup yang dihentikan(titik)</i>	3	25.000.000	Kec. Larantuka, Kec. Ile Bura, Kec. Tanjung Bunga	APBD II(DAU)			3	20.000.000
2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab./kota	<i>Luas daerah ynung dikonservasi/direhabilitasi (Ha)</i>	15	200.000.000			KP-6	KU-3	15	200.000.000
2	11	03	2.03	04	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	<i>Jumah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakatdi kabupaten/kota yang dilaksanakan(dokumen)</i>	1	200.000.000	Kec. Titehena (Desa Adabang,Kec. Tanjung Bunga (Desa Bandona),Kec. Witihama (Desa Lewopulo),Kec. Larantuka, Kec. Ile Bura, Kec. Wulanggitang (Ojan Detun), Kec. Solor Barat, Kec. Solor Selatan, Kec. Adonara Timur(Desa Puhu)	APBD II(DAU)			1	200.000.000
2	11	04			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	<i>Persentase pengelolaan keanekaragaman Hayati (%)</i>	9,41	270.000.000				PP	15,82	173.350.290
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Pengelolaan Luas Ruang Terbuka Hijau(Ha)</i>	2,5	270.000.000				KP	6,62	173.350.290

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	11	04	2.01	02	Pengelolaan Taman keanekaragaman Hayati di luar kawasan Hutan	Luas Taman Kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/ Kota (Luas Total Ha)	2	120.000.000	Kec. Witihamas, Ile Boleng, Kec. Adonara	APBD II			2	73.350.290
		04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang seharusnya dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/ Kota (Ha)	0,5	150.000.000	Kec. Larantuka, Kec. Adonara Timur, Kec. Witihamas, Kec. Adonara	APBD II			4,62	100.000.000
2	11	05			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3	Persentase ketaatan fasilitas kesehatan, usaha/kegiatan terhadap pengelolaan limbah B3 (%)	37,31	30.000.000					50,66	20.000.000
2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Ketaatan, Usaha Kegiatan Terhadap Pengelolaan Limbah B3(laporan)	1	30.000.000					1	20.000.000
2	11	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/ izin penyimpanan sementara dan pengukuran limbah B3 yang diverifikasi (laporan)	1	30.000.000	19 Kec	APBD II			1	20.000.000
2	11	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Hidup dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase usaha yang wajib AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL yang memiliki dokumen persetujuan Lingkungan dan prosentase koordinasi dan sinkronisasi pengawasan sanksi upaya PPLH (%)	32,77	110.000.000				PP	45,67	75.000.000
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen usaha yang wajib AMDAL, UKL-UPL dan SPPL(dokumen)	100	110.000.000				KP	100	75.000.000
2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan/ atau persetujuan lingkungan, surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup dan surat kelayakan operasi (Dokumen)	50	40.000.000	19 Kec	APBD II			50	25.000.000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan /atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang diawasi terhadap ketaatan terhdap persetujuan lingkungan, surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidu (SPPL), surat kelayakan operasional yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Usaha))	50	30.000.000	19 Kec	APBD II			50	25.000.000
2	11	06	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLHD (dokumen)	1	40.000.000	19 Kec	APBD II			1	25.000.000
2	11	08			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jumlah lembaga atau kelompok masyarakat atau istitusi yang terdaftar yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (lembaga)	1	75.000.000				PP	1	50.000.000
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah	Jumlah Lembaga atau Instansi/Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Edukasi tentang Lingkungan Hidup(Lembaga)	1	75.000.000				KP	1	50.000.000
2	11	08	2.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga/ kelompok masyarakat/ Institusi(lembaga)	1	75.000.000	Kec. Adon. Timur	APBD II			1	50.000.000
2	11	10			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terhadap PPLH dan dokumen penyelesaian sengketa (%)	100	80.000.000				PP	100	50.000.000
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa Terhadap Lingkungan Hidup(Dokumen)	2	80.000.000				KP	1	50.000.000
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kab/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani (Dokumen)	1	40.000.000	19 Kec	APBD II			1	25.000.000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	11	10	2.01	02	Koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi penyelesaian dokumen sengketa dan/ atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan (Dokumen)	1	40.000.000	19 Kec	APBD II			1	25.000.000
2	11	11			Program Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah (%)	99	555.000.000			PN-6	PU-3	99	230.000.000
						Persentase Pengurangan sampah (%)	0,27						0,28	
2	11	11	2.01		Pengelolaan sampah	Jumlah penanganan sampah (Ton)	8.078,44	555.000.000			KP-6	KU-3	15.772,19	230.000.000
2	11	11	2.01	02	Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali	Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali (laporan)	1	75.000.000	Kec. Larantuka	APBD II			1	50.000.000
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlh sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA kab/kota (ton)	8.078,44	195.000.000	Kec. Larantuka dan Kec. Adonara Timur(Kel. Waiwerang Kota)	APBD II			15.772,19	150.000.000
2	11	11	2.01	04	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat (kelompok)	3	35.000.000	Kel. Sarotari Tengah, Kel. Ekasapta (Kec. Larantuka), Oe Sayang (Kec. Adonara Tengah)	APBD II			3	30.000.000
2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kab/Kota	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir (unit)	2	250.000.000	Kec. Adonara Timur, Kec. Larantuka	APBD II			-	

BAB V

PENUTUP

RENJA Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur untuk periode tahun 2023. Dokumen ini selanjutnya menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan program pembangunan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pelaksanaan program kegiatan baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka investasi pembangunan dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar-program, dalam satu instansi dan antar-instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah (PD) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Upaya pencapaian sasaran pembangunan yang tertuang dalam RENJA Tahun 2023 melalui pelaksanaan program, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan dengan itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RENJATahun2023 sebagai berikut:

1. Semua *stakeholders* yang berkepentingan dalam pembangunan daerah yang berwewasan Lingkungan di Kabupaten Flores Timur berkewajiban untuk menjadikan RENJA Tahun 2023 sebagai acuan dalam pelaksanaan program pembangunannya, terutama yang berkaitan prioritas pembangunan dengan sasaran dan target kinerja yang sudah termuat dalam RENJA;
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodik baik triwulan, semesteran maupun akhir tahun yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian target kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan, dan kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, serta kesesuaiannya dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan Peraturan lainnya;
3. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Semua perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, selanjutnya tidak dapat keluar dari kerangka acuan yang telah ditetapkan di dalam RENJA ini, kecuali timbul hal-hal yang mendesak dan prioritas yang tidak sempat termuat dalam RENJA Tahun 2023 ini.

Larantuka, Agustus 2022



Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Flores Timur,

SERVULUS SATEL DEMOOR, S.Hut
Pembina Tk.I
NIP. 197112172000121002

The background of the page features an abstract design. A large, solid green circle is positioned in the upper right quadrant. To its right, a smaller green circle is partially visible. A thin, light green diagonal line runs from the top left towards the bottom right, passing behind the larger green circle. The bottom of the page is a solid light green color.

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2022